

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019, menetapkan bahwa Jurnal HAM mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

- Pembina : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
Pengarah : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum;
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- Pemimpin Redaksi
(*Editor*) : Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M.
Anggota Dewan Redaksi
(*Section Editor*) : 1. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum.
2. Dr. Irawati Handayani, S.H., LL.M
3. Ahyar, S.H., M.H.
4. Firdaus, S.Sos., M.H.
5. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.
6. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
7. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si.
8. Donny Michael, S.H., M.H.
- Redaksi Pelaksana : Fitriyani, S.H., M.Si.
- Sekretaris : 1. Lindung Budi Mulyawan, S.H.
2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
3. Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.
- Journal Manager dan Layoter* : 1. Lindung Budi Mulyawan, S.H.
2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
- Penyunting Tata Bahasa dan Naskah
(*Copyeditor*) : 1. B. Lora Christyanti, S.I.P.
2. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P.
3. Mira Sukmawati, S.I.P.
4. Amirah Balqis, S.H.

Teknologi Sistem Informasi : 1. Agus Priyatna, S.Kom.
2. Harysandy Permana, S.Kom.
3. Adi Octaviantara, A.Md.

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimile (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan

PT. Pohon Cahaya Jl. Mandala Raya Selatan No. 20 A-B
Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan 11440
Telepon: 081391694388

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com/pusbangdatin@gmail.com serta wajib meng-upload tulisan tersebut melalui Open Journal System (OJS) pada e-journal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

Peran Kolaboratif Organisasi Masyarakat Sipil Mengintegrasikan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Tata Kelola Bisnis Perkebunan Sawit di Sumatera Utara (<i>Collaborative Role of Civil Society Organizations in the Integration Human Rights Values in the Palm Oil Plantation Business Governance into North Sumatra</i>)	167-186
Majda El Muhtaj; Fazli Rachman	
Upaya Perlindungan Anak terhadap Perkara <i>Hadhanah</i> (<i>Children Protection Effort Against Hadhanah Cases</i>)	187-198
Anton Afrizal Candra	
Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren (<i>Fulfillment of the Rights of the Students in Case of Violations of Human Rights Committed by a Board of Boarding School</i>)	199-214
Suci Amelia Harlen	
<i>The Study on the Coronavirus Pandemic using Human Rights and Human Security Approach</i>	215-234
Indah Pangestu Amaritasari	
Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Nafkah sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak (<i>Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights</i>)	235-252
M. Nur Syafiuddin	
<i>Three Arguments to Support International Binding Treaty on Business and Human Rights</i>	253-270
Surya Oktaviandra	
Dilema Hak Atas Pekerjaan dalam Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel (<i>The Dilemma of the Right To Work in Flexible Labour Markets Policies</i>).....	271-286
Syahwal Syahwal	
Penanganan Hak Atas Perumahan yang Layak Terkait Backlog di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus di Kota Samarinda (<i>Decent Housing Rights Handling Related to Backlog during Covid-19 Pandemic: Samarinda City Case Study</i>)	287-304
Rina Elsa Rizkiana; Michael Gerry	
Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit (<i>Juridical Analysis of Obligations to Fulfill Human Rights in the Business Practices of Oil Palm Plantation</i>)	305-332
Pardomuan Gultom	

Hak Suaka versus Kedaulatan:
Studi Kasus Pencari Suaka Etnis Rohingya
*(Right to Asylum versus Sovereignty:
Case Study of the Rohingyas' Asylum Seekers)*..... 333-346
B. Lora Christyanti

BIODATA PENULIS **xix**

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi kedua yaitu Jurnal HAM Volume 13 Nomor 2, Agustus 2022. Seperti terbitan sebelumnya, pada edisi ini dimuat 10 (sepuluh) tulisan karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Volume 13 Nomor 2, Agustus 2022 kali ini, dibuka dengan tulisan yang mengulas tentang Peran Kolaboratif Organisasi Masyarakat Sipil Mengintegrasikan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Tata Kelola Bisnis Perkebunan Sawit di Sumatera Utara. Ada juga tulisan yang membahas Upaya Perlindungan Anak terhadap Perkara Hadhanah, Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren, *The Study on the Coronavirus Pandemic using Human Rights and Human Security Approach*, Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Nafkah sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak, *Three Arguments to Support International Binding Treaty on Business and Human Rights*, Dilema Hak Atas Pekerjaan dalam Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel, Penanganan Hak Atas Perumahan yang Layak Terkait *Backlog* di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus di Kota Samarinda, Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit, Hak Suaka versus Kedaulatan: Studi Kasus Pencari Suaka Etnis Rohingya.

Kiranya tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan *Open Jurnal System* maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Selamat Membaca

=REDAKSI=

**KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI
YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN**

1. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Indonesia
2. Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL., M.A.
Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala, Indonesia
3. Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM.
Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
4. Dr. Muhammad Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A.
Politeknik Imigrasi
5. Dr. dr. Hj. Trini Handayani, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Suryakencana
6. Nurhidayatulloh, S.H.I., Sp.PD., LL.M., M.H., M.H.I.
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, Indonesia
7. Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
UPN Veteran Jakarta
8. Eko Riyadi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, Indonesia
9. Aji Mulyana, S.H., M.H.
LPPM Universitas Suryakencana
10. Taufiqqurrahman, S.H., M.Kn
Fakultas Hukum
UPN Veteran Jakarta

11. Saru Arifin, S.H., LL.M.
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
12. M. Tanzil Multazam, S.H., M.Kn
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
13. Vu Cong Giao, Ph.D.
Institute of Public Policy and Law
Vietnam National University
14. Yanuar Sumarlan, Ph.D.
Instiute of Human Rights and Peace Studies
Mahidol University
15. Dwi Fidhayanti, M.H.
Universitas Islam Negeri Maliki Malang

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Majda El Muhtaj; Fazli Rachman (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan)

(Collaborative Role of Civil Society Organizations in the Integration Human Rights Values in the Palm Oil Plantation Business Governance into North Sumatra)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 2, August 2022, page 167-186

This study aims to explore the collaborative effort by the Civil Society Organization (CSO) and its significance to encourage corporations in terms of compliance and implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), particularly in palm oil plantations in North Sumatra. Integration of human rights values into conducting business activities is mandated by UNGP. Indeed, each of the principal actors of UNGP has a governance system to govern their powers and influences and a so-called polycentric governance system. Therefore, a collaboration strategy for strengthening synergy to implement UNGP is needed. This research is conducted by qualitative analysis method with an exploratory design study by collecting data through interviews and various secondary references related to UNGP and its commentaries and reports on this relevant study. The result indicates that PKPA's programs enhance the capacity building of the primary stakeholder including people who are potentially affected by the company's activities. This is the strategic partnership to incorporate UNGP into palm oil plantation business activities. This research recommends that the PKPA's programs, especially REBOUND can be able to be developed by creating new participative models to strengthen the implementation of UNGP, mainly human rights due diligence mechanism and access to effective remedies affected by corporations.

Keywords: *UNGP; PKPA; business and human rights; inclusive villages.*

Anton Afrizal Candra (Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia)

(Children Protection Effort Against Hadhanah Cases)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 2, August 2022, page 187-198

The hadhanah often lead to problems regarding law enforcement and the protection of children. The hadhanah case after being decided by the judge turned out to have no executive power when hadhin or hadhinah who had the obligation and responsibility to fulfill hadhanah financing could not implement it. This study aims to determine the efforts that can be made to protect children, especially against hadhanah problems from the perspective of Law Number 35 of 2014. The nature of this research is descriptive and the type of research is normative juridical, with a statutory approach and conceptual approach. Data collection was done by conducting literacy studies, and analyzing qualitatively. The results of the study found a form of legal protection for children as the executorial power against hadhanah case decision based on Law Number 35 of 2014.

Keywords: *hadhanah; law; child protection efforts.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Suci Amelia Harlen (Magister Kriminologi Universitas Indonesia)

(Fulfillment of the Rights of the Students in Case of Violations of Human Rights Committed by a Board of Boarding School)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 2, August 2022, page 199-214

Sexual violence is one of the human rights violations in which women are the dominant victims. To date, most victims who have experienced violence are reluctant to submit complains because they do not know that the situation that happened to them was violence and because of the lack of support from their families. The female students who became the victims had been lured by their ideals, lied to for religious reasons, and were verbally threatened by HW. The focus of this research is to analyze what kind of human rights violations that were committed by the leaders of Islamic boarding schools against female students. The research method uses empirical juridical because it examines the situation happened what is happening in society. This study aims to provide solutions to violations against human rights that have occurred and as anticipation so that similar human rights violations do not occur. The results of the study show that sexual violence can be prevented by providing sexual understanding to children, providing complaint services, and having parental control over children. However, if sexual violence has occurred, then the state needs to help in providing access to education and access to health for victims, as well as punish the perpetrators.

Keywords: *human rights; solutions; prevention.*

Indah Pangestu Amaritasari (Pusat Studi Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)

(The Study on the Coronavirus Pandemic using Human Rights and Human Security Approach)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 2, August 2022, page 215-234

In March 2020, The World Health Organization (WHO) finally announced a coronavirus or Covid-19 disease outbreak as a pandemic. According to WHO, the status of a pandemic is determined if a new disease has not had an antidote against the spread of the virus in regions of the world. The virus attacked individuals and no doubt the impact on people is significant, which relates to the security of the people and human rights aspects. The article explores the argumentative basis of human security and further analyzes the problem, strategy and needs in the lens of human rights related to pandemic in the framework of human security. It aims to analytically describe human security approaches in relation to the COVID-19 with human rights perspective through the common pattern of threat identified worldwide and plausible strategies based on literature study. The state strategy addressed in the article exists as a set of examples of best practices and/or critics toward the policy with materials provided by journals. The article uses a qualitative approach with a systematic literature study based on human security framework with human-right analysis and results in a generic set of human security frameworks for COVID-19 with the perspective of human rights.

Keywords: *pandemic; coronavirus; covid-19; human security; human rights.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

M. Nur Syafiuddin (Mahkamah Agung Republik Indonesia)

(Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 2, August 2022, page 235-252

Children have an important positioning in spheres of human life, starting from the scope of family life to the state, therefore every policy must be able to guarantee the fulfillment of children's rights. This study aims to describe the guarantee of children's human rights through the accentuation of the best interests of children in the decision to make a living. The result of the study is useful as a basis for adaptive thinking for judges in making decisions for children's livelihoods that prioritize the best interests of children. This study uses normative legal research with a philosophy and legislation approach, and a prescriptive analysis method. The accentuation of the best interests of the child in the judge's decision regarding livelihoods must be able to lead to guarantee of the rights of the child's welfare which includes three aspects, namely the presence of parents, condition (maturity and experience) and the environment in which the child lives. The advice given is to remember that living is one of the needs of children to fulfill their natural rights in order to survive and improve their quality of life, so judges should always conduct in-depth studies (ijtihad) in every examination of children's livelihood cases.

Keywords: *accentuation; best interests children; decision.*

Surya Oktaviandra (Faculty of Law, Andalas University)

(Three Arguments to Support International Binding Treaty on Business and Human Rights)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 2, August 2022, page 253-270

The development of the promotion and protection of human rights, in general, has been gladdening. However, in instances where human rights are affected by business activity, efforts to uphold them meet certain obstacles. This is exacerbated when the business activity involves a complex and international dimension in it—i.e., in the case of multinational enterprises. This paper provides three arguments to support the establishment of international binding treaty on business and human rights. It examines the current Corporate Social Responsibility platform, state responsibility to protect human rights, and also the importance and benefits of legally binding treaty. This research found that the implementation of the current CSR platform fails to prevent business harm to human rights. Therefore, state responsibility is fundamental in this matter and should be enhanced by the duty to establish an international treaty. A legally binding treaty is important to protect human rights from irresponsible business activity and can be beneficial and relevant to the interest of parties involved in business and human rights.

Keywords: *business; human right; treaty; state responsibility; corporate social responsibility.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Syahwal Syahwal (Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

(The Dilemma of the Right To Work in Flexible Labour Markets Policies)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 2, August 2022, page 271-286

The right to work demands the role of the State in its fulfillment but the development of a flexible labor market poses a dilemma for the state in fulfilling the right to work. This study was conducted by using a normative type of research that examines the right to work in a flexible labor market using a statutory approach. In Indonesia, the flexible labor market is embodied in the Job Creation Act, which describes the state's dilemmatic position in carrying out its duties for the right to work. Against this dilemmatic position, the state prioritizes job creation over the feasibility of the jobs created. Based on this research, the author outlines the importance of a holistic approach in viewing human rights in the legislation process. So that the availability of work and the feasibility of work are not placed separately. This is because indecent work places the degree of human beings, who are trying to be protected by human rights, in a vulnerable position.

Keywords: *the right to work; decent work; labour market flexibility; neoliberalism.*

**Rina Elsa Rizkiana; Michael Gerry (Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Terbuka, Tangerang)**

(Decent Housing Rights Handling Related to Backlog during Covid-19 Pandemic: Samarinda City Case Study)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 2, August 2022, page 287-304

Backlog issues were the main problems during the pandemic. Samarinda City Government is trying to overcome this by presenting affordable housing with the concept of the welfare state (wohlfahrtsstaat). However, this has not been realized, especially for the homeless and People with Social Welfare Problems (PMKS). This study aims to analyze the Samarinda City Government's effort to overcome the backlog issue to fulfill the right to decent housing for PMKS. This research used a juridical normative method by statute and a case study approach with legal sociological. The results show the housing rights fulfillment in Samarinda City has not been fulfilled as a crucial issue to mitigate the spread of Covid-19. The policy implications are still in conflict with constraints such as land availability and are not yet equity-oriented. It is necessary to synchronize policy arrangements with the fulfillment of rights through human rights conventions which are ratified by the Samarinda City Government on availability, affordability, and sustainability aspects.

Keywords: *backlog; covid-19 pandemic; decent housing; human rights.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Pardomuan Gultom (Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional (UNAS), Jakarta)

(Juridical Analysis of Obligations to Fulfill Human Rights in the Business Practices of Oil Palm Plantation)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 2, August 2022, page 305-332

Human rights are natural rights inherent in every human being. In the classical human rights paradigm, the state is considered the main actor carrying out obligations to fulfill human rights as stated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). However, with the emergence of facts regarding the impact of the company's presence in a number of human rights violations, both domestic and multinational, there has been a discourse on the importance of non-state actors to be drawn as stakeholders in the human rights regime through the UNGP Principles in 2011. Agrarian conflicts as a result of the presence of oil palm plantations become a separate problem for business entities in the fulfillment of human rights, especially ESC rights, as a manifestation of the implementation of social and environmental responsibility norms. The method used in this research is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. This study aims to provide a juridical understanding that oil palm plantations as non-state actors also carry out obligations in fulfilling human rights.

Keywords: *human rights; social and environmental responsibility; business and human rights; oil palm plantations.*

B. Lora Christyanti (Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung)

(Right to Asylum versus Sovereignty: Case Study of the Rohingyas' Asylum Seekers)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 2, August 2022, page 333-346

The right to asylum is a fundamental right under international law. Despite its fundamental nature, there are still numerous challenges to protect this right. The main challenge is sovereignty, which is the primary basis for the state in determining the one permitted to live on its own territory. The complicity that the Rohingya underwent in seeking asylum in other countries is clear evidence of this problem. Rohingya is recognized as one of the world's most persecuted minorities, grappling with decades of systematic atrocities. This paper aims to take a closer look at the problems of the right to asylum by answering questions about the challenges Rohingya faced. The study was conducted by juridical method to investigate the right of asylum problems through the experience of the Rohingya. As a result, the Rohingyas encounter a number of challenges in seeking and enjoying their right to asylum. These include denial of access to cross borders, forced deportation, denial of access to procedures to verify refugee status, use of voluntary repatriation as a pretext for withdrawing asylum, use of legal means to expel asylum seekers, and use of non-entre'e mechanisms.

Keywords: *human rights; rights of asylum; Rohingyas.*

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Majda El Muhtaj; Fazli Rachman (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan)

Peran Kolaboratif Organisasi Masyarakat Sipil Mengintegrasikan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Tata Kelola Bisnis Perkebunan Sawit di Sumatera Utara

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2022, hal 167-186

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya kolaboratif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mendorong akuntabilitas korporasi dalam kepatuhan dan implementasi *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGP), khususnya di sektor bisnis perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Integrasi nilai-nilai HAM ke dalam tata kelola bisnis merupakan mandat penting UNGP. Selain itu, masing-masing aktor utama dalam UNGP memiliki basis tata kelola sistematis untuk menjalankan kekuasaan dan pengaruhnya dan dikenal sebagai sistem tata kelola polisentris. Di sinilah pentingnya upaya membangun strategi kolaborasi yang efektif untuk saling menguatkan taraf implementasi UNGP. Penelitian ini menggunakan analisis metode kualitatif dengan desain kajian eksploratif dan koleksi data berdasarkan wawancara dan ragam data sekunder yang berkaitan dengan UNGP, termasuk komentar dan penafsirannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program PKPA mampu mendorong peningkatan kapasitas pemangku kebijakan dalam pelibatan multipihak menginkorporasi UNGP ke dalam aktivitas bisnis. Penelitian ini merekomendasikan program-program Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), yakni RESBOUND dapat dikembangkan melalui penciptaan model-model partisipatif baru untuk mendukung penguatan implementasi UNGP, terutama penguatan mekanisme uji tuntas HAM dan akses pemulihan yang efektif atas dampak pelanggaran HAM dalam relasi aktivitas bisnis.

Kata Kunci: UNGP; PKPA; bisnis dan HAM; desa inklusif.

Anton Afrizal Candra (Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia)

Upaya Perlindungan Anak terhadap Perkara Hadhanah

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2022, hal 187-198

Problematika *hadhanah* banyak berujung kepada masalah tentang penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak. Perkara *hadhanah* setelah diputuskan oleh hakim ternyata tidak mempunyai kekuatan eksekutorial di mana saat *hadhin* atau *hadhinah* yang mempunyai beban dan tanggung jawab untuk memenuhi pembiayaan *hadhanah* tidak dapat melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak khususnya terhadap masalah *hadhanah* dalam perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014. Sifat penelitian ini deskriptif dan jenis penelitiannya yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dengan cara melakukan studi literasi, dan penganalisisan secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai kekuatan eksekutorial dari putusan perkara *hadhanah* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Kata Kunci: *hadhanah*; undang-undang; upaya perlindungan anak.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Suci Amelia Harlen (Magister Kriminologi Universitas Indonesia)

Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2022, hal 199-214

Kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran HAM yang mana perempuan dominan menjadi korban. Sampai saat ini, sebagian besar korban yang mengalami kekerasan enggan untuk mengadu karena ketidaktahuan bahwa apa yang terjadi merupakan kekerasan dan minimnya dukungan dari keluarga. Santriwati yang menjadi korban telah diiming-imingi cita-cita, dibohongi dengan alasan agaman, dan diancam secara verbal oleh HW. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis seperti apa pelanggaran HAM yang dilakukan pemimpin pondok pesantren kepada santriwati. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris karena mengkaji apa yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan solusi atas pelanggaran HAM yang telah terjadi dan sebagai antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran HAM serupa. Hasil kajian menunjukkan kekerasan seksual dapat dicegah dengan memberikan pemahaman seksual kepada anak, menyediakan layanan pengaduan, dan adanya kontrol orang tua terhadap anak. Namun, bila kekerasan seksual telah terjadi, maka negara perlu membantu menyediakan akses pendidikan dan akses kesehatan kepada korban, serta menghukum pelaku.

Kata Kunci: hak asasi manusia; solusi; pencegahan.

M. Nur Syafiuddin (Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Nafkah sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2022, hal 235-252

Anak mempunyai kedudukan penting dalam lingkup kehidupan manusia, mulai dari lingkup kehidupan berkeluarga sampai bernegara, karena itu setiap kebijakan harus dapat menjamin terpenuhinya hak anak. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penjaminan hak asasi anak melalui aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam putusan nafkah. Hasil penelitian berguna sebagai dasar pemikiran adaptif bagi hakim dalam memberikan putusan nafkah anak yang mengedepankan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat dan perundang-undangan, dan metode analisis preskriptif. Aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam putusan nafkah harus dapat menjamin hak kesejahteraan anak yang meliputi tiga aspek yaitu kehadiran orang tua, keadaan (kematangan dan pengalaman) anak dan lingkungan tempat tinggal anak. Saran yang disampaikan adalah mengingat nafkah sebagai salah satu kebutuhan anak untuk memenuhi hak kodratnya agar tetap bertahan dan meningkatkan kualitas hidupnya, maka kepada para hakim hendaknya senantiasa melakukan kajian mendalam (ijtihad) dalam setiap memeriksa perkara nafkah anak.

Kata Kunci: aksentuasi; kepentingan terbaik anak; putusan.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Syahwal Syahwal (Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Dilema Hak Atas Pekerjaan dalam Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2022, hal 271-286

Hak atas pekerjaan menuntut peran Negara dalam pemenuhannya, namun kehadiran pasar tenaga kerja fleksibel telah menimbulkan dilema bagi negara dalam pemenuhan hak atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menelaah hak atas pekerjaan di dalam pasar tenaga kerja fleksibel dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pasar tenaga kerja fleksibel mwujud dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menggambarkan posisi dilematis negara dalam menjalankan tanggungjawabnya terhadap hak atas pekerjaan. Terhadap posisi dilematis ini, negara mendahulukan terciptanya lapangan kerja dibandingkan dengan kelayakan pekerjaan yang diciptakan. Berdasarkan penelitian ini, terkuak pentingnya pendekatan holistik dalam memandang hak asasi manusia. Sehingga antara ketersediaan pekerjaan dan kelayakan pekerjaan tidak diletakkan secara terpisah. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang tidak layak, menempatkan derajat manusia yang dilindungi oleh hak asasi manusia dalam posisi yang rentan.

Kata Kunci: hak atas pekerjaan; kerja layak; pasar tenaga kerja fleksibel; neoliberalisme.

**Rina Elsa Rizkiana; Michael Gerry (Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Terbuka, Tangerang)**

***Penanganan Hak Atas Perumahan yang Layak Terkait Backlog di Masa Pandemi Covid 19:
Studi Kasus di Kota Samarinda***

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2022, hal 287-304

Isu *backlog* menjadi permasalahan utama perumahan di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Samarinda berusaha mengatasi dengan rumah layak huni yang terjangkau dan sesuai konsep negara kesejahteraan (*wohlfahrtsstaat*). Namun, hal ini belum dapat diwujudkan terutama bagi tunawisma dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Kota Samarinda mengatasi isu backlog untuk memenuhi hak atas perumahan layak bagi PMKS. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak atas perumahan yang layak di Kota Samarinda belum terpenuhi dan menjadi isu krusial dalam upaya mitigasi penyebaran Covid-19. Implikasi kebijakan masih berbenturan dengan kendala seperti ketersediaan lahan dan belum berorientasi pada pemerataan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan kebijakan dengan pemenuhan hak melalui konvensi HAM yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Kota Samarinda terkait aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan.

Kata Kunci: hak asasi manusia; perumahan yang layak; backlog; pandemi covid 19.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Pardomuan Gultom (Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional (UNAS), Jakarta)

Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2022, hal 305-332

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap insan manusia. Dalam paradigma klasik HAM, negara dianggap sebagai aktor utama pemenuhan kewajiban HAM sebagaimana disebutkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Namun, dengan munculnya fakta mengenai dampak kehadiran perusahaan dalam sejumlah pelanggaran HAM, baik domestik maupun multinasional, muncul wacana pentingnya aktor non-negara untuk ditarik sebagai pemangku kewajiban dalam rejim HAM melalui Prinsip UNGP pada tahun 2011. Konflik agraria sebagai akibat dari kehadiran perkebunan kelapa sawit menjadi problem tersendiri bagi entitas bisnis dalam pemenuhan HAM, khususnya Hak EKOSOB, sebagai wujud dari pelaksanaan norma tanggung jawab sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai aktor non-negara juga mengemban kewajiban dalam pemenuhan HAM.

Kata Kunci: hak asasi manusia; tanggung jawab sosial dan lingkungan; bisnis dan hak asasi manusia; perkebunan kelapa sawit.

B. Lora Christyanti (Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung)

Hak Suaka versus Kedaulatan: Studi Kasus Pencari Suaka Etnis Rohingya

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2022, hal 333-346

Hak suaka merupakan hak dasar yang diakui oleh hukum internasional. Terlepas dari pentingnya hak ini, masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak ini. Salah satunya adalah kedaulatan negara, yang menjadi dasar dalam menentukan siapa saja yang diizinkan untuk tinggal dalam wilayah teritorial suatu negara. Permasalahan yang dihadapi oleh Etnis Rohingya dalam mencari suaka di negara lain merupakan bukti nyata permasalahan ini. Rohingya diakui sebagai *one of the world's most persecuted minorities*, yang menghadapi beragam kekejaman sistematis sejak beberapa dekade yang lalu. Tulisan ini membahas tentang problematika hak untuk mendapatkan suaka dengan menjawab pertanyaan apakah bentuk tantangan yang dihadapi oleh Etnis Rohingya dalam mencari suaka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis dengan melihat pengalaman etnis Rohingya untuk mengetahui problematika hak suaka. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terlepas dari adanya hak suaka, hak untuk memberikan suaka merupakan hak negara yang bersumber dari kedaulatan negara. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beragam tantangan etnis Rohingya dalam mencari dan menikmati hak suaka. Bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi oleh etnis Rohingya meliputi penolakan akses untuk melintasi perbatasan, pengusiran paksa, penolakan akses ke prosedur untuk memverifikasi status pengungsi, penggunaan repatriasi sukarela sebagai dalih untuk penarikan suaka, penggunaan sarana legal untuk mengusir pencari suaka, dan penggunaan mekanisme *non-entre'e*.

Kata kunci: hak asasi manusia; hak suaka; etnis Rohingya.

